



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA

Jln. Banawa No.214, Kel. Ganti, Kec. Banawa, Kab. Donggala Telp/Fax : 0457-71260 KP. 94351,
Email : rutandonggala@rocketmail.com, Email : divpas.rutandonggala@gmail.com

Donggala, 23 Juni 2023

Nomor : W.24.PAS.PAS.7-KU.04.01-346
Lampiran : 1 Laporan
Perihal : Surat Pengantar Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Tengah

Di –
Palu

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester 1 Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.
NIP. 198410252002121003

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**



RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA
SEMESTER 1
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk-Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Semester 1 Tahun Anggaran 2023.

Sebagai perwujudan penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Semester 1 Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu.

Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala pada masa mendatang.

Donggala, 23 Juni 2023

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.

NIP. 198410252002121003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi Wewenang	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Isu Strategis / Permasalahan	5
1.5 Dasar Hukum	5
1.6 Pengertian dan Pengukuran Kinerja	6
1.7 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala	9
2.2 Perjanjian Kinerja	11
2.3 Alokasi Anggaran	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Uraian Singkat	16
3.2 Capaian Kinerja	19
3.3 Realisasi Anggaran	23
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
BAB IV PENUTUP	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	26
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rutan Kelas IIB Donggala merupakan organisasi vertikal yang mempunyai peran strategis terutama di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, Rutan Kelas IIB Donggala mempunyai peran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana dan strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. Harapan dan tujuan besar yang hendak dicapai ialah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, sebagai bentuk ikhtiar menjawab ekspektasi dan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Berangkat dari hal tersebut, penting kiranya untuk mampu memberikan laporan pertanggung jawaban yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala. Oleh karena itu penting kiranya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Laporan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada jajaran Rutan Kelas IIB Donggala atas semua pekerjaan yang dibuat dalam rangka tertib administrasi menuju akuntabilitas kepada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Donggala Semester 1 Tahun 2023 ini ialah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2023. Oleh sebab itu, diharapkan dengan terbitnya LKjIP Semester 1 Tahun 2023 ini mampu berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala merupakan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang penempatan, perawatan dan pelayanan tahanan. Bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala bertempat di Jl. Banawa No. 214 Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama Semester 1 Tahun 2023. LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

- Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan.

- Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

- Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala;
- Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 tahun 1985, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi:

- Melakukan pelayanan tahanan;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
- Melakukan pengelolaan Rutan;
- Melakukan urusan tata usaha.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan
2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
3. Kepala Kesatuan Pengamana Rutan
4. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
5. Petugas Tata Usaha

I. Sub Seksi Pengelolaan

Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan;

II. Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR)

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;

III. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;

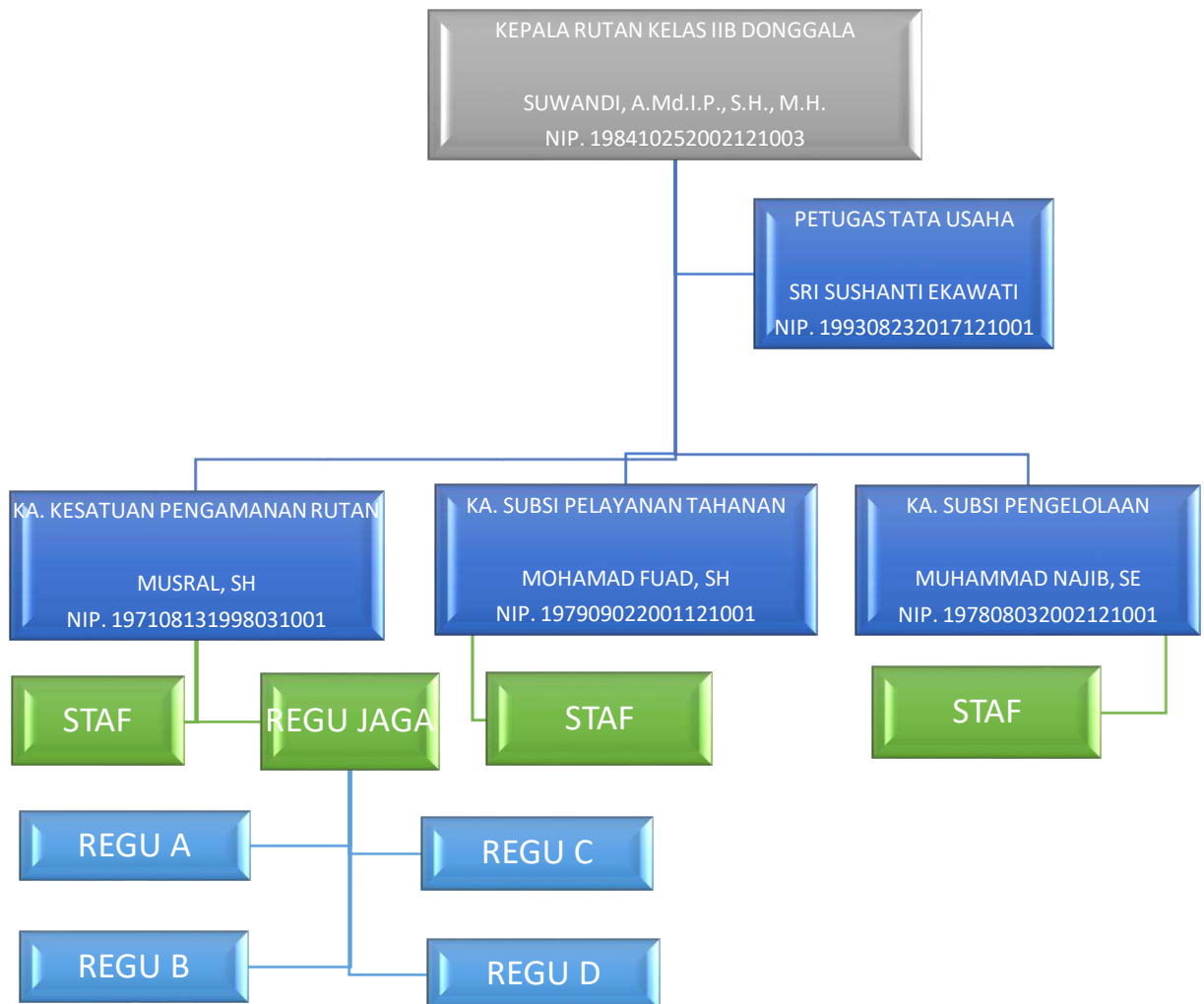
IV. Petugas Tata Usaha

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Implementasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, menggabungkan Subseksi Pengelolaan dan Petugas Tata Usaha, yang disebabkan karena kurangnya SDM yang ada. Ketiga bidang itu kemudian berjalan dengan tugasnya masing-masing. Sebuah Rumah Tahanan dipimpin oleh seorang Kepala, sesuai Keputusan Menteri. Kepala Rutan inilah yang menjadi tonggak organisasi Rutan dan membawahi bidang-bidang pelaksanaannya. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kepala Rutan memegang peran pembina utama baik itu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun Petugas Rutan. Pembinaan-pembinaan formal itu dilakukan secara periodik tiap bulan.

Sebagai gambaran struktur organisasi Rutan, berikut ini disajikan skema lengkap susunan organisasi yang ada di Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala.

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA



1.4. Isu Strategis/Permasalahan

NO.	PERMASALAHAN	PENYEBAB	UPAYA PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN	RENCANA PENYELESAIAN JANGKA PANJANG
A	PENGELOLAAN			
1.	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Staf.	Pegawai yang ditempatkan di subsidi Pengelolaan masih berstatus sebagai Penjaga Tahanan.	Mengajukan Permohonan perubahan kelas jabatan.	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia.
2.	Kurangnya Sarana dan Prasarana kendaraan operasional dan perangkat computer.	Satker yang belum lama terbentuk sehingga minimnya fasilitas kantor.	Melakukan Permintaan Kepada Kantor Wilayah	Melakukan Permintaan Kepada Kantor Wilayah
B	PELAYANAN TAHANAN			
1.	Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Staf	Pegawai Yang di tempatkan di subsidi Yantah masih berstatus sebagai Penjaga Tahanan	Mengajukan Permohonan perubahan kelas jabatan	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia.
C	KESATUAN PENGAMANAN RUTAN			
1.	Pengawasan terhadap Keamanan	Masih kurangnya jumlah Anggota Regu Pengamanan	Melaksanakan Kontrol keliling secara berkala	Mengajukan permohonan penambahan Sumber Daya Manusia

1.5. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Unit Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

1.6. Pengertian dan Pengukuran Kinerja

Secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu/organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya capaian kinerja tersebut perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran/target organisasi yang dapat dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan atau target/sasaran yang telah ditentukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi/hasil

pekerjaan dengan target/sasaran pekerjaan yang telah ditentukan sebagai tujuan organisasi.

Melaksanakan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Donggala sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatannya atas alokasi anggaran yang telah digunakan selama kurun waktu 1 tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Laporan kinerja ini memuat target/sasaran kinerja yang telah ditentukan oleh masing-masing Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Target/sasaran kinerja ini disusun dalam suatu Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah dan disampaikan kepada pimpinan Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Untuk menguraikan Perjanjian Kinerja tersebut disusunlah Perjanjian Kinerja Kepala Bagian/Bidang dan Perjanjian Kinerja Kepala Subbagian/Subbidang yang berisi target/sasaran kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran dan disampaikan kepada Kepala Divisi.

Dalam laporan kinerja juga menjelaskan realisasi capaian kinerja sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Melalui pengukuran ini, maka dapat diketahui tingkat keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dalam mencapai target/sasaran kerjanya. Selanjutnya dilakukan suatu analisa terhadap factor pendukung dan penghambat dalam upaya mencapai target/sasaran kinerja tersebut. Perlu ditemukan solusi terhadap factor penghambat,

sehingga laporan kinerja yang disusun dapat digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala secara berkelanjutan.

1.7. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Semester 1 Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Rutan Kelas IIB Donggala, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Rutan Kelas IIB Donggala.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2023, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Semester 1 Tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Semester 1 tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Maklumat, Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

a. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Dapat dikatakan visi adalah gambaran masa akan datang yang ingin dicapai dari suatu organisasi. Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala dibuat untuk :

- ✓ Gambar kedepan mengenai tujuan yang ingin dicapai
- ✓ Mengekspresikan kreatifitas dari masing-masing bagian untuk mencapai tujuan organisasi
- ✓ Menjadi pemersatu berbagai gagasan strategis serta menumbuhkan komitmen
- ✓ Menjamin kesinambungan kepemimpinan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala.

Visi yang ditetapkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

“Menjadi Institusi Pelayanan Hukum yang profesional, akuntabel, transparan, dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan”.

b. Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Melaksanakan Perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Proses Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pengayoman antara lain:

- ✓ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- ✓ Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- ✓ Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- ✓ Mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan, pengaduan dan melakukan pengawasan. Sebuah maklumat pelayanan membawa konsekuensi besar. Maklumat Pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah :

“Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maklumat pelayanan adalah salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyalurkan keinginan dan sarannya serta melakukan pengawasan dan komplain bila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek pelaksanaannya.

d. Nilai-Nilai Dasar

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menetapkan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap petugas dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Nilai-nilai dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Profesional
- b) Akuntabel
- c) Sinergi
- d) Transparan
- e) Inovatif

e. Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Tujuan diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Rumusan tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
- 2) Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja
- 3) Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan
- 4) Terwujudnya reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan
- 5) Terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan
- 6) Terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan
- 7) Meningkatkan profesionalisme dan budaya kerja pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat
- 8) Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*).

2.2 Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem online. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU).

Sasaran program/IKU Direktorat Pemasyarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian

Kinerjanya. Berikut susunan Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Donggala Tahun 2023 yang diuraikan dalam bentuk matrik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasidan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukumsesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib.	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang over staying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

	wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2023 yaitu Rp. 6.422.144.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) **Layanan Tahanan**
 - Administrasi Tahanan Rp. 16.800.000.-
 - Pembimbingan Kegiatan Tahanan Rp. 57.930.000.-
- 2) **Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan**
 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Rp. 3.311.817.000.-
- 3) **Layanan Keamanan dan Ketertiban**
 - Penegakkan Hukum dan Ketertiban Rp. 11.600.000.-
 - Pengawasan Rp. 33.220.000.-
- 4) **Layanan BMN**
 - Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 6.830.000.-
- 5) **Layanan Hubungan Masyarakat**
 - Penyediaan Informasi Publik Rp. 490.000.-

6) Layanan Umum	
• Urusan Umum	Rp. 18.484.000.-
• Fasilitas Kerja New Normal	Rp. 109.000.-
7) Layanan Perkantoran	
• Gaji dan Tunjangan	Rp. 2.234.313.000.-
• Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 630.075.000.-
8) Layanan Manajemen SDM	
• Pembinaan Kepegawaian	Rp. 78.276.000.-
9) Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
• Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Rp. 18.020.000.-
10) Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
• Penyusunan Laporan Kinerja	Rp. 800.000.-
11) Layanan Manajemen Keuangan	
• Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Rp. 2.200.000.-
12) Layanan Reformasi Kinerja	
• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	Rp. 1.180.000.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Uraian Singkat

Setiap rupiah APBN harus dikelola secara & efisien untuk meningkatkan *Value for Money* APBN bagi pembangunan Indonesia, atas dasar pengelolaan kinerja dan anggaran kesesuaian dengan perencanaan program dan penganggaran perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi Kinerja dan Anggaran sebagai alat (*tool*) untuk membuktikan (*prove*) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana kinerja (*performance goal*), dan sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Metode dalam penyusunan dan evaluasi kinerja hendaknya menggunakan SMART sistem (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Rebound*).

Spesific: Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih. Misalnya, ketika hendak meningkatkan pencapaian output kegiatan, kita mencampurkan secara spesifik jenis kegiatan dan anggaran setiap rincian kegiatan.

Measurable: Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bias berupa volume, rupiah, presentase, atau angka nominal. Misalnya menurunkan angka residivis, atau meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 10% (persentase).

Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI) artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau parameter yang terukur). Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Achievable: Artinya target yang ditetapkan masih bias dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data.

Data yang pertama adalah data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai *historical performance*). Data yang kedua adalah membandingkan dengan kinerja satuan kerja yang sama di Provinsi lain (atau disebut juga *bechmark data*). Data yang ketiga biasanya merujuk pada kondisi ekonomi makro dan prospek pertumbuhan bisnis yang terjadi di Provinsi

Sulawesi Tengah. Data-data ini akan memberikan pengaruh signifikan bagi proses penetapan target kinerja dan juga pada gilirannya target kinerja pegawai.

Pada sisi lain, penetapan target yang *achievable* juga mesti memperhatikan prinsip “*stretching goals*” (atau menggantungkan target setinggi dan sejauh mungkin). Berbagai pengalaman menunjukkan, penetapan target yang sangat menantang (*very challenging goals*) memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai secara dramatis.

Relevant: Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada. Dengan demikian, sasaran yang ditetapkan juga menjadi lebih tajam dan bersifat kritikal bagi peningkatan kritikal bagi peningkatan kinerja Kantor Wilayah secara keseluruhan.

Time Bound: Artinya sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas. Kapan kegiatan harus selesai. Apakah minggu pertama atau kedua bulan ini, ataukah minggu terakhir bulan depan. Target waktu ini juga bisa diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin. Missal kapan laporan bulanan harus selesai tiap bulannya atau kapan saja proses pemeliharaan rutin harus dilakukan.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu insitansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala adalah sebagai berikut:

1. Sub Seksi Pengelolaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merealisasikan perjanjian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan, Sub Seksi Pengelolaan pada Semester 1 Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuat usulan kenaikan pangkat pegawai.
- b. Membuat usulan pengangkatan PNS 14 pegawai berstatus CPNS.

- c. Membuat usulan SK kenaikan gaji berkala.
- d. Melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan dalam lingkup Rutan Donggala.
- e. Melengkapi data dukung Kegiatan Zona Integritas WBK pada Aplikasi Online E-RB Kemenkumham.

2. Kesatuan Pengamanan Rutan

Dalam rangka terwujudnya ketertiban dan keamanan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, Kesatuan Pengamanan Rutan Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penggeledahan blok hunian narapidana dan tahanan tiap bulan dan juga secara insidental.
- b. Melakukan pencegahan terhadap masuknya barang terlarang ke dalam rutan.
- c. Melakukan pemindahan narapidana ke Lapas guna mencegah Over Capacity dalam Blok.
- d. Melakukan Pengecekan fasilitas pendukung pengamanan Rutan.

3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan. Selama periode Semester 1 Tahun 2023 Sub Seksi Pelayanan Tahanan telah melaksanakan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- a. Total Warga Binaan yang teregister di Rutan Donggala sebanyak 374 orang per 23 Juni 2023.
- b. Mengeluarkan narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana maupun dengan syarat sebanyak 144 orang per 23 Juni 2023 dengan rincian:
 - Bebas Murni : 33 Orang
 - Cuti Bersyarat : 23 Orang
 - Pembebasan Bersyarat : 11 Orang
 - Asimilasi Rumah : 72 Orang
 - Mutasi : 5 Orang
 - Bebas dari Dakwaan : 0 Orang
 - Bebas dari Tuntutan : 0 Orang

- c. Memberikan Remisi kepada narapidana sebanyak 164 Orang.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan melalui POSBAKUMADIN Poso Tentena dan LBH Rumah Hukum Tadulako.
- e. Melaksanakan perawatan kesehatan kepada narapidana.
- f. Melaksanakan Pelatihan Penjamah Makanan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.

3.2. Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan terlaksananya beberapa kegiatan pada Semester 1 Tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala sebagai berikut : .

SASARAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%	40%
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	45%
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	40%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	42%
	Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	42%

	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	40%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang over staying	90%	44%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	22%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	22%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	42%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	40%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%	42%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	40%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan

	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	-
--	----------------------------	-----------	---

Selama periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Donggala telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan

a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasarakatan

Dalam rangka mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan dan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, Rutan Kelas IIB Donggala melaksanakan survey IKM secara berkala (setiap bulan) melalui pengumpulan dan pengolahan data hasil kuisisioner / poin tingkat kepuasan. Laporan rekapitulasi hasil survey IKM pada Semester 1 Tahun 2023 menunjukkan pengunjung/penjenguk Warga Binaan Pemasarakatan merasa puas dengan layanan pemasarakatan, yang ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:

No.	BULAN	PUAS	TIDAK PUAS	JUMLAH RESPONDEN
1	Januari	50	0	50
2	Februari	61	0	61
3	Maret	38	0	38
4	April	31	0	31
5	Mei	30	0	30
6	Juni	30	0	30

tabel indeks kepuasan masyarakat

b) Rekapitulasi Data Residivis

Rekapitulasi data residivis dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pelayanan pembinaan narapidana yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Data terkait residivis pada Rutan Kelas IIB Donggala pada Semester 1 tahun 2023 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah residivis jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut Rekapitulasi Data Residivis tahun 2022 hingga semester 1 tahun 2023.

TAHUN	2022	S1 2023	SELISIH
Jumlah Residivis	66	21	45

tabel rekapitulasi data residivis

- c) Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar Dalam rangka mencapai sasaran ini, Rutan Kelas IIB Donggala menyediakan layanan informasi pemasarakatan melalui loket informasi. Petugas layanan informasi akan melayani mulai pukul 08.00 s.d 14.30 pada hari Senin s.d Kamis, Pukul 08.00 s.d 13.30 pada hari Jumat dan, 08.00 s.d 11.30 pada hari Sabtu. Selain itu layanan informasi pemasarakatan kepada publik dapat dilayani secara online melalui SDP Pemasarakatan. Ditjen Pemasarakatan mengharuskan Satker melakukan pengisian data SDP pada aplikasi SDP-Publik setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi pemasarakatan di masyarakat luas. Data terkait jumlah narapidana, informasi PB, CB, CMB, dan Asimilasi Rumah dapat disajikan secara online kepada publik dengan mengakses <https://www.layanan.ditjenpas.go.id>. SDP Rutan Kelas IIB Donggala menunjukkan adanya kepatuhan dalam mendukung pelayanan informasi data pemasarakatan yang up-to-date.

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Rutan sesuai standar

Pada Semester 1 Tahun 2023 seluruh Warga Binaan telah mendapatkan pembinaan kepribadian, keterampilan, pelayanan integrasi, pendayagunaan TPP dan pelayanan administrasi. Hal ini disebabkan dari kebijakan pimpinan yang mengharuskan seluruh Warbinpas harus mengikuti kegiatan keagamaan, sholat berjamaah dan pengajian bagi WBP Islam, ibadah harian bagi agama Kristen, berkebun, dan pertukangan. Warbinpas yang mengikuti pembinaan keterampilan akan mendapatkan sertifikat sebagai bekal dalam mencari pekerjaan saat mereka bebas.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Data rekapitulasi capaian kinerja Semester 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase indikator kinerja kegiatan layanan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, dan angka persentase 100% ini sesuai dari target capaian yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan tidak adanya aduan yang masuk. Sedangkan persentase indikator kinerja kegiatan pencegahan gangguan keamanan yaitu sebanyak 100%. Rutan

Kelas IIB Donggala secara berkelanjutan melaksanakan sidak razia penggeledahan, melakukan pengawalan warbinpas dan penggeledahan penjenguk dan barang bawaannya. Persentase indikator kinerja kegiatan gangguan keamanan yang ditindaklanjuti juga menunjukkan persentase yang sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar 100%. Dilihat dari Nihilnya gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian).

4. Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen

Kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum serta layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan).

5. Data realisasi anggaran pada Semester 1 Tahun 2023 ini sebesar Rp. 3.699.998.532.- atau 57.61% dari total anggaran sebesar Rp. 6.422.144.000,-

3.3. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	3.311.817.000.-	1.697.708.170.-	51.26%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	74.730.000.-	7.791.750.-	10.43%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	44.820.000.-	21.284.500.-	47.49%

4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.990.777.000.-	1.973.214.112.-	65.98%
---	--	-----------------	-----------------	--------

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas penunjang.

a. Sumber Daya Manusia

Pada 23 Juni 2023 jumlah pegawai Rutan Kelas IIB Donggala adalah 55 orang. Dari segi kuantitas masih terdapat kekurangan pegawai untuk beberapa bidang tugas dan fungsi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, kekurangan jumlah pegawai tersebut menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pekerjaan (*Overlapping Jobs*), kondisi ini berimbas pada produktivitas kinerja instansi.

b. Sumber Daya Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang terbatas dalam rangka mendukung kinerja instansi seperti, alat-alat kesehatan yang minim, genset yang belum tersedia, peralatan kehumasan dan kendaraan mobil dinas. Untuk memperlancar jalannya kegiatan kantor cara yang dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh sumber daya sarana prasarana yang ada melalui pemeliharaan (*maintenance*) secara berkala.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester 1 Tahun Anggaran 2023 Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya. LKjIP Semester 1 Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, baik dari aspek finansial maupun non finansial pada Semester 1 Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai rencana juga diakibatkan dari isu strategis dan kondisi yang dihadapi saat ini. Secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, adalah sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan tuisi terlambat bahkan belum terlaksana, terkendala oleh kurangnya pemahaman SDM dan pedoman pelaksanaan tuisi yang belum terbit.
2. Kurangnya koordinasi yang baik antar pegawai dan pejabat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta pihak eksternal lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.
3. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah ditetapkan.

5. Terdapat kendala pada realisasi anggaran dikarenakan keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

4.2. Saran

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Merujuk pada kendala dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala:

1. Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tuisi yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, perlu kiranya memperkuat koordinasi dengan Unit Eselon I, sehingga dapat lebih efektif dan terarah dalam merumuskan perencanaan program dan kegiatan, terutama terkait pada pedoman pelaksanaan tuisi.
2. Peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala serta melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal kalender kerja (*disbursement plan*) yang telah disepakati, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam *disbursement plan*.
5. Para pelaksana kegiatan diharapkan segera memenuhi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat segera dibuat SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dilaporkan pada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setempat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Semester 1 Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala, sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala. Di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



Donggala, 23 Juni 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Suwandi, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.

NIP. 198410252002121003

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwandi
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Donggala


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Suwandi
NIP. 19841025 200212 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83



BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS BERKEMAJUAN



SEMAKIN PASTI
KAMI AKUNTABEL, SINERGI, TRANSPARAN, INOVATIF

REFORMASI HUKUM



PEMAJUAN
HARI ASAS MANUSIA



3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80
----	--	--	----

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%

BerAKHLAK

SEMAKIN
PASTIREFORMASI
HUKUMPEMAJUAN
JUARA ASASI MANGSA

		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhiya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.431.367.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.431.367.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.990.777.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.990.777.000,-

Palu, 17 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Donggala


Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001


Suwandi
NIP. 19841025 200212 1 003








**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suwandi
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu, 17 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Donggala

Kami


Suwandi
NIP. 19841025 200212 1 003

BerAKHLAK

**SEMAKIN
FASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johanis Tangkudung, Bc.IP
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palu , 12 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Donggala


Johanis Tangkudung, Bc.IP
NIP 196507111988111001

**DEKLARASI
JANJI KINERJA 2022**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,422,144,000	0	2,970,827,493	729,171,039	3,699,998,532	57.61 %	2,722,145,468
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3,431,367,000	0	1,409,952,328	316,832,062	1,726,784,420	50.32 %	1,704,582,580
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3,431,367,000	0	1,409,952,328	316,832,062	1,726,784,420	50.32 %	1,704,582,580
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3,386,547,000	0	1,388,667,828	316,832,062	1,705,499,920	50.36 %	1,681,047,080
BDC.001 Layanan Tahanan	74,730,000	0	7,791,750	0	7,791,750	10.43 %	66,938,250
051 Administrasi Tahanan	16,900,000	0	2,142,750	0	2,142,750	12.75 %	14,657,250
051.0A Pelaksanaan Sidang TPP	3,100,000	0	1,282,750	0	1,282,750	41.38 %	1,817,250
521211 Belanja Bahan	3,100,000	0	1,282,750	0	1,282,750	41.38 %	1,817,250
000013. Pengadaan Dan Penjualan	3,100,000	0	1,282,750	0	1,282,750	41.38 %	1,817,250
051.0B Pemberian Ramisi, PB, CB, CMB, CMK	6,500,000	0	560,000	0	560,000	8.62 %	5,940,000
521211 Belanja Bahan	6,500,000	0	560,000	0	560,000	8.62 %	5,940,000
000014. Makanan	2,800,000	0	0	0	0	0.00 %	2,800,000
000015. Kudpapan	1,050,000	0	0	0	0	0.00 %	1,050,000
000016. Pengadaan Dan Penjualan	2,650,000	0	560,000	0	560,000	21.13 %	2,090,000
051.0D Rapat Koordinasi Insansi Penegak Hukum	7,200,000	0	300,000	0	300,000	4.17 %	6,900,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	300,000	0	300,000	4.17 %	6,900,000
000017. Transport Lokal	7,200,000	0	300,000	0	300,000	4.17 %	6,900,000
052 Pembinaan Kegiatan Tahanan	57,930,000	0	5,649,000	0	5,649,000	9.75 %	52,281,000
052.0A Kegiatan Keagamaan	36,500,000	0	3,782,000	0	3,782,000	10.36 %	32,718,000
521211 Belanja Bahan	12,500,000	0	1,582,000	0	1,582,000	12.66 %	10,918,000
000018. Banner Dan Spanduk	12,500,000	0	1,582,000	0	1,582,000	12.66 %	10,918,000
522151 Belanja Jasa Profesi	16,800,000	0	1,600,000	0	1,600,000	9.52 %	15,200,000
000019. honorarium Pembina Keagamaan	16,800,000	0	1,600,000	0	1,600,000	9.52 %	15,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	600,000	0	600,000	8.33 %	6,600,000
000020. Transport Pembinaan Keagamaan	7,200,000	0	600,000	0	600,000	8.33 %	6,600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 2 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0B Kegiatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	21,430,000	0	1,867,000	0	1,867,000	8.71 %	19,563,000
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	1,367,000	0	1,367,000	17.09 %	6,633,000
000021. Pengadaan, Penjualan Dan Pelaporan	8,000,000	0	1,367,000	0	1,367,000	17.09 %	6,633,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,430,000	0	500,000	0	500,000	3.72 %	12,930,000
000022. Perengkapan Kegiatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara	13,430,000	0	500,000	0	500,000	3.72 %	12,930,000
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3,311,817,000	0	1,380,876,078	316,832,062	1,697,708,170	51.26 %	1,614,108,830
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	3,311,817,000	0	1,380,876,078	316,832,062	1,697,708,170	51.26 %	1,614,108,830
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	3,022,200,000	0	1,204,636,078	303,117,062	1,507,753,170	49.89 %	1,514,446,830
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	3,022,200,000	0	1,204,636,078	303,117,062	1,507,753,170	49.89 %	1,514,446,830
000001. Belanja Pengadaan Bahan Makanan	3,022,200,000	0	1,204,636,078	303,117,062	1,507,753,170	49.89 %	1,514,446,830
005.0B Kebutuhan Sandang	37,350,000	0	36,952,000	0	36,952,000	98.93 %	398,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,350,000	0	36,952,000	0	36,952,000	98.93 %	398,000
000002. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Sehari hari	37,350,000	0	36,952,000	0	36,952,000	98.93 %	398,000
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum	75,738,000	0	73,448,000	0	73,448,000	96.98 %	2,290,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,738,000	0	73,448,000	0	73,448,000	96.98 %	2,290,000
000003. Penyediaan Peralatan Makan Minum	24,900,000	0	24,528,000	0	24,528,000	98.51 %	372,000
000004. Penyediaan Peralatan Dapur	50,838,000	0	48,920,000	0	48,920,000	96.23 %	1,918,000
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	18,675,000	0	7,275,000	0	7,275,000	38.96 %	11,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,675,000	0	7,275,000	0	7,275,000	38.96 %	11,400,000
000005. Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	18,675,000	0	7,275,000	0	7,275,000	38.96 %	11,400,000
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	14,814,000	0	1,800,000	0	1,800,000	12.15 %	13,014,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,814,000	0	1,800,000	0	1,800,000	12.15 %	13,014,000
000006. Keperluan Lansia	14,814,000	0	1,800,000	0	1,800,000	12.15 %	13,014,000
005.0F Extra Fooding	54,900,000	0	35,500,000	13,715,000	49,215,000	89.64 %	5,685,000
521211 Belanja Bahan	54,900,000	0	35,500,000	13,715,000	49,215,000	89.64 %	5,685,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 3 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
00007 Kegiatan Pemberian Extra Voeding bagi WBP selama Bulan Puasa	54,900,000	0	35,500,000	13,715,000	49,215,000	89.64 %	5,685,000
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana/Anak	30,480,000	0	1,000,000	0	1,000,000	3.28 %	29,480,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,240,000	0	0	0	0	0.00 %	15,240,000
00008 Biaya perawatan di Luar Lapas/ Rutan/ LPKA	15,240,000	0	0	0	0	0.00 %	15,240,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	15,240,000	0	1,000,000	0	1,000,000	6.56 %	14,240,000
00009 Honor Tenaga Medis	15,240,000	0	1,000,000	0	1,000,000	6.56 %	14,240,000
005.0I Perlangkapan Medis Poliklinik	57,360,000	0	20,265,000	0	20,265,000	35.33 %	37,095,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,360,000	0	20,265,000	0	20,265,000	35.33 %	37,095,000
00010 Penyediaan Perlangkapan Medis Poliklinik	12,960,000	0	0	0	0	0.00 %	12,960,000
00011.1. Pengadaan Obat-obatan Bagi WBP	44,400,000	0	20,265,000	0	20,265,000	45.64 %	24,135,000
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
00012. Masker	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
BHB Operasi Bidang Keamanan	44,820,000	0	21,284,500	0	21,284,500	47.49 %	23,535,500
EHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	44,820,000	0	21,284,500	0	21,284,500	47.49 %	23,535,500
051 Pengawasan Keamanan dan Ketertiban	11,600,000	0	4,784,500	0	4,784,500	41.25 %	6,815,500
051.0A Pengawasan Keamanan dan Ketertiban	11,600,000	0	4,784,500	0	4,784,500	41.25 %	6,815,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11,600,000	0	4,784,500	0	4,784,500	41.25 %	6,815,500
00023. Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	11,600,000	0	4,784,500	0	4,784,500	41.25 %	6,815,500
052 Pengawasan	33,220,000	0	16,500,000	0	16,500,000	49.67 %	16,720,000
052.0A Pengawasan Narapidana	3,600,000	0	300,000	0	300,000	8.33 %	3,300,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	300,000	0	300,000	8.33 %	3,300,000
00024. Transport Pengawasan	3,600,000	0	300,000	0	300,000	8.33 %	3,300,000
052.0B Perpindahan Mutasi Narapidana dari Rutan ke Lepas	29,620,000	0	16,200,000	0	16,200,000	54.69 %	13,420,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,320,000	0	16,200,000	0	16,200,000	61.55 %	10,120,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 4 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000025. Uang Haran	19,320,000	0	9,200,000	0	9,200,000	47.62 %	10,120,000
000026. Transport PP	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,300,000	0	0	0	0	0.00 %	3,300,000
000027. Transport Lokal	3,300,000	0	0	0	0	0.00 %	3,300,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,990,777,000	0	1,560,875,165	412,338,947	1,973,214,112	65.98 %	1,017,562,888
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	2,990,777,000	0	1,560,875,165	412,338,947	1,973,214,112	65.98 %	1,017,562,888
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,890,301,000	0	1,481,674,165	412,338,947	1,894,013,112	65.53 %	996,287,888
EBA.956 Layanan BMH	6,830,000	0	4,110,000	0	4,110,000	60.18 %	2,720,000
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	6,830,000	0	4,110,000	0	4,110,000	60.18 %	2,720,000
052.0A Administrasi Pengadaan Barang	6,830,000	0	4,110,000	0	4,110,000	60.18 %	2,720,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	6,830,000	0	4,110,000	0	4,110,000	60.18 %	2,720,000
000028. Honor Pejabat Pengadaan Barang	2,720,000	0	0	0	0	0.00 %	2,720,000
000029. Pojok Pengadaan BAMA	4,110,000	0	4,110,000	0	4,110,000	100.00 %	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	490,000	0	0	0	0	0.00 %	490,000
051 Penyediaan Informasi Publik	490,000	0	0	0	0	0.00 %	490,000
051.0A Penyediaan Informasi Publik	490,000	0	0	0	0	0.00 %	490,000
521211 Belanja Bahan	490,000	0	0	0	0	0.00 %	490,000
000092. Penjilidan, Pengadaan	490,000	0	0	0	0	0.00 %	490,000
EBA.962 Layanan Umum	18,593,000	0	5,098,500	133,000	5,231,500	28.14 %	13,361,500
051 Urusan Umum	18,484,000	0	5,098,500	133,000	5,231,500	28.30 %	13,252,500
051.0A Urusan Umum	18,484,000	0	5,098,500	133,000	5,231,500	28.30 %	13,252,500
521211 Belanja Bahan	18,484,000	0	5,098,500	133,000	5,231,500	28.30 %	13,252,500
000089. Pengadaan, Penjilidan	430,000	0	0	0	0	0.00 %	430,000
000090. Spanduk, Banner	18,054,000	0	5,098,500	133,000	5,231,500	28.98 %	12,822,500
052 Fasilitas Kerja (New Normal)	109,000	0	0	0	0	0.00 %	109,000
052.0A Tanpa Sub Komponen	109,000	0	0	0	0	0.00 %	109,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 5 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521241 Belanja Barang Non Operasional - Peranganan Pandemi COVID-19	109,000	0	0	0	0	0.00 %	109,000
000091. Pengadaan Tes Swab Untuk Kegiatan Insidentil	109,000	0	0	0	0	0.00 %	109,000
EBA 904 Layanan Penkantaran	2,804,388,000	0	1,472,465,605	412,205,947	1,884,671,612	65.80 %	970,716,388
001 Gaji dan Tunjangan	2,234,313,000	0	1,202,125,394	385,303,145	1,587,428,499	71.05 %	646,894,501
001.0A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	2,225,583,000	0	1,193,594,354	385,303,145	1,578,897,499	70.94 %	646,685,501
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,374,029,000	0	812,503,900	273,012,500	1,085,516,400	79.00 %	288,512,600
000030. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke 14)	106,452,000	0	129,827,480	0	129,827,480	121.06	-23,375,480
000031. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke 13)	106,452,000	0	0	136,377,500	136,377,500	128.11	-29,925,500
000032. Belanja Gaji Pokok PNS	1,161,125,000	0	682,676,420	136,635,000	819,311,420	70.56 %	341,813,580
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	31,000	0	18,756	6,181	24,937	80.44 %	6,063
000033. Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	0	15,932	2,481	18,413	73.65 %	6,587
000034. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke 14)	3,000	0	2,824	0	2,824	94.13 %	176
000035. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji Ke 13)	3,000	0	0	3,700	3,700	123.33	-700
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	108,162,000	0	49,843,310	16,181,100	66,024,410	61.04 %	42,137,590
000036. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji Ke 14)	7,730,000	0	7,935,300	0	7,935,300	102.66	-205,300
000037. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji Ke 13)	7,730,000	0	0	7,969,290	7,969,290	103.10	-239,290
000038. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	92,702,000	0	41,908,010	8,211,810	50,119,820	54.07 %	42,582,180
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	30,913,000	0	14,529,468	4,703,684	19,233,152	62.22 %	11,679,848
000039. Belanja Tunj. Anak PNS	26,495,000	0	12,213,092	2,376,094	14,589,186	55.06 %	11,905,814
000040. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 13)	2,209,000	0	0	2,327,569	2,327,569	105.37	-118,569
000041. Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji Ke 14)	2,209,000	0	2,316,376	0	2,316,376	104.86	-107,376
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	22,680,000	0	9,720,000	3,240,000	12,960,000	57.14 %	9,720,000
000042. Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 14)	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	100.00	0
000043. Belanja Tunj. Struktural PNS	19,440,000	0	8,100,000	1,620,000	9,720,000	50.00 %	9,720,000
000044. Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji Ke 13)	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	125,720,000	0	58,015,000	24,520,000	82,535,000	65.65 %	43,185,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 6 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000045. Belanja Tunj. Fungsional PNS	107,760,000	0	49,200,000	12,260,000	61,460,000	57.03 %	46,300,000
000046. Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 13)	8,980,000	0	0	12,260,000	12,260,000	136.53	-3,280,000
000047. Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji Ke 14)	8,980,000	0	8,815,000	0	8,815,000	98.16 %	165,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	5,260,000	0	0	0	0	0.00 %	5,260,000
000048. Belanja Tunj. Pph PNS	4,504,000	0	0	0	0	0.00 %	4,504,000
000049. Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 13)	378,000	0	0	0	0	0.00 %	378,000
000050. Belanja Tunj. Pph PNS (Gaji Ke 14)	378,000	0	0	0	0	0.00 %	378,000
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	97,676,000	0	56,197,920	18,394,680	74,592,600	76.37 %	23,083,400
000051. Belanja Tunj. Beras PNS	97,676,000	0	56,197,920	18,394,680	74,592,600	76.37 %	23,083,400
511129 Belanja Uang Makan PNS	444,912,000	0	179,586,000	44,875,000	224,461,000	50.45 %	220,451,000
000052. Belanja Uang Makan PNS Gol III	115,440,000	0	43,401,000	11,100,000	54,501,000	47.21 %	60,939,000
000053. Belanja Uang Makan PNS Gol II	316,080,000	0	138,185,000	33,775,000	169,960,000	53.67 %	146,720,000
000054. Belanja Uang Makan PNS Gol IV	12,792,000	0	0	0	0	0.00 %	12,792,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	16,200,000	0	13,180,000	370,000	13,550,000	83.64 %	2,650,000
000055. Belanja Tunj. Umum CPNS	12,980,000	0	10,470,000	185,000	10,655,000	82.21 %	2,305,000
000056. Belanja Tunj. Umum CPNS (Gaji Ke 13)	1,620,000	0	0	185,000	185,000	11.42 %	1,435,000
000057. Belanja Tunj. Umum CPNS (Gaji Ke 14)	1,620,000	0	2,710,000	0	2,710,000	167.28	-1,090,000
001.0B Uang Lembur	8,730,000	0	8,531,000	0	8,531,000	97.72 %	199,000
512211 Belanja Uang Lembur	8,730,000	0	8,531,000	0	8,531,000	97.72 %	199,000
000058. Uang Lembur Pegawai	5,400,000	0	5,363,000	0	5,363,000	99.31 %	37,000
000059. Uang Makan Lembur Pegawai	3,330,000	0	3,168,000	0	3,168,000	95.14 %	162,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	630,075,000	0	270,340,311	26,902,802	297,243,113	47.18 %	332,831,887
002.0A Kesehatan Pegawai	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
000060. Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	1,400,000	0	0	0	0	0.00 %	1,400,000
002.0C Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	99,916,000	0	47,309,000	569,000	47,878,000	47.92 %	52,038,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 7 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,916,000	0	47,309,000	569,000	47,878,000	47.92 %	52,038,000
000051. Halaman	5,500,000	0	5,251,000	0	5,251,000	95.47 %	249,000
000106. Gedung Tidak Bertingkat	94,416,000	0	42,058,000	569,000	42,627,000	45.15 %	51,789,000
002.0D Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	13,140,000	0	1,600,000	75,000	1,675,000	12.75 %	11,465,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,140,000	0	1,600,000	75,000	1,675,000	12.75 %	11,465,000
000082. AC	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000063. Laptop	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000064. Peralatan Dapur	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
000065. Komputer/PC	4,380,000	0	800,000	75,000	875,000	19.98 %	3,505,000
000086. Printer	2,760,000	0	800,000	0	800,000	28.99 %	1,960,000
002.0E Pemeliharaan Kendaraan	38,240,000	0	25,102,340	400,000	25,502,340	66.69 %	12,737,660
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,240,000	0	25,102,340	400,000	25,502,340	66.69 %	12,737,660
000067. Roda 2	3,840,000	0	686,500	0	686,500	17.88 %	3,153,500
000068. Roda 4	34,400,000	0	24,415,840	400,000	24,815,840	72.14 %	9,584,160
002.0F Langganan Daya Dan Jasa	252,000,000	0	104,605,971	19,530,802	124,136,773	49.26 %	127,863,227
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	30,000,000	0	6,639,250	0	6,639,250	22.13 %	23,360,750
000069. Internet	30,000,000	0	6,639,250	0	6,639,250	22.13 %	23,360,750
522111 Belanja Langganan Listrik	204,000,000	0	97,966,721	19,530,802	117,497,523	57.60 %	86,502,477
000070. Listrik	204,000,000	0	97,966,721	19,530,802	117,497,523	57.60 %	86,502,477
522112 Belanja Langganan Telepon	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000071. Telepon	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
522113 Belanja Langganan Air	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
000072. PDAM	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
002.0G Jasa Pos Dan Giro	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000
000073. Jasa Pos Dan Giro	2,400,000	0	0	0	0	0.00 %	2,400,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 8 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0H Keperluan Perkantoran	77,962,000	0	44,948,000	108,000	45,056,000	57.79 %	32,906,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	43,212,000	0	26,926,000	108,000	27,034,000	62.56 %	16,178,000
000074. Keperluan Pokok	33,220,000	0	25,391,000	108,000	25,499,000	76.76 %	7,721,000
000075. Pengelolaan Limbah	9,992,000	0	1,535,000	0	1,535,000	15.36 %	8,457,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,750,000	0	18,022,000	0	18,022,000	51.86 %	16,728,000
000076. ATK Rutin	34,750,000	0	18,022,000	0	18,022,000	51.86 %	16,728,000
002.0I Konsultasi Dan Koordinasi Ke Jakarta	6,430,000	0	0	0	0	0.00 %	6,430,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,430,000	0	0	0	0	0.00 %	6,430,000
000077. Tiket PP	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000078. Penginapan	730,000	0	0	0	0	0.00 %	730,000
000079. Uang Harau	530,000	0	0	0	0	0.00 %	530,000
000080. Transport Bandara	170,000	0	0	0	0	0.00 %	170,000
002.0J Jamuan Tamu	4,817,000	0	785,000	0	785,000	16.30 %	4,032,000
521211 Belanja Bahan	4,817,000	0	785,000	0	785,000	16.30 %	4,032,000
000081. Jamuan Tamu	4,817,000	0	785,000	0	785,000	16.30 %	4,032,000
002.0K Honor Operasional Satuan Kerja	74,640,000	0	24,880,000	6,220,000	31,100,000	41.67 %	43,540,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74,640,000	0	24,880,000	6,220,000	31,100,000	41.67 %	43,540,000
000082. PPA/BP	6,000,000	0	2,000,000	500,000	2,500,000	41.67 %	3,500,000
000083. Bendahara Pengeluaran	10,320,000	0	3,440,000	860,000	4,300,000	41.67 %	6,020,000
000084. Bendahara Pengeluaran Pembantu	7,680,000	0	2,560,000	640,000	3,200,000	41.67 %	4,480,000
000085. Staf Pengelola Keuangan	7,680,000	0	2,560,000	640,000	3,200,000	41.67 %	4,480,000
000086. Kuasa Pengguna Anggaran	31,080,000	0	10,360,000	2,580,000	12,940,000	41.67 %	18,140,000
000087. Pejabat Penjuji SPM	11,880,000	0	3,960,000	990,000	4,950,000	41.67 %	6,930,000
002.0L Penambah Daya Tahan Tubuh	59,130,000	0	21,110,000	0	21,110,000	35.70 %	38,020,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	59,130,000	0	21,110,000	0	21,110,000	35.70 %	38,020,000
000088. Penyedia Makanan/Minum Petugas Jaga Malam	59,130,000	0	21,110,000	0	21,110,000	35.70 %	38,020,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 9 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	78,276,000	0	78,076,000	0	78,076,000	99.74 %	200,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	78,276,000	0	78,076,000	0	78,076,000	99.74 %	200,000
051 Pembinaan Kepegawaian	78,276,000	0	78,076,000	0	78,076,000	99.74 %	200,000
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	78,276,000	0	78,076,000	0	78,076,000	99.74 %	200,000
521211 Belanja Bahan	3,876,000	0	3,876,000	0	3,876,000	100.00 %	0
000093. Kudapan	3,876,000	0	3,876,000	0	3,876,000	100.00 %	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	68,400,000	0	68,200,000	0	68,200,000	99.71 %	200,000
000094. Latihan PPB Dan Menembak	68,400,000	0	68,200,000	0	68,200,000	99.71 %	200,000
522151 Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %	0
000095. Honorarium Instruktur	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00 %	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	22,200,000	0	1,125,000	0	1,125,000	5.07 %	21,075,000
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18,020,000	0	0	0	0	0.00 %	18,020,000
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	18,020,000	0	0	0	0	0.00 %	18,020,000
051.0A Penyusunan RKAKL	18,020,000	0	0	0	0	0.00 %	18,020,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
000096. Pengadaan Dan Perjalanan	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,820,000	0	0	0	0	0.00 %	17,820,000
000097. Tiket Transport PP	1,560,000	0	0	0	0	0.00 %	1,560,000
000098. Penginapan	9,600,000	0	0	0	0	0.00 %	9,600,000
000099. Uang Harian	6,660,000	0	0	0	0	0.00 %	6,660,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	800,000	0	150,000	0	150,000	18.75 %	650,000
051 Penyusunan Laporan Kinerja	800,000	0	150,000	0	150,000	18.75 %	650,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	800,000	0	150,000	0	150,000	18.75 %	650,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	150,000	0	150,000	75.00 %	50,000
000104. Pengadaan, Perjalanan, dan Pelaporan	200,000	0	150,000	0	150,000	75.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Juni 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 407004 RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA

Hal 10 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000105. transport Lokal	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2,200,000	0	150,000	0	150,000	6.82 %	2,050,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	2,200,000	0	150,000	0	150,000	6.82 %	2,050,000
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	2,200,000	0	150,000	0	150,000	6.82 %	2,050,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	150,000	0	150,000	37.50 %	250,000
000102. Pengadaan Daan Perjalanan	400,000	0	150,000	0	150,000	37.50 %	250,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000103. Transport Lokal	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1,180,000	0	825,000	0	825,000	69.92 %	355,000
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WKM/WBSM)	1,180,000	0	825,000	0	825,000	69.92 %	355,000
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1,180,000	0	825,000	0	825,000	69.92 %	355,000
521211 Belanja Bahan	1,180,000	0	825,000	0	825,000	69.92 %	355,000
000100. Pembuatan Spanduk, Banner	830,000	0	675,000	0	675,000	81.33 %	155,000
000101. Perjalanan Dan Pengadaan	350,000	0	150,000	0	150,000	42.86 %	200,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir